

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat menjadi referensi bagi peneliti lain. Dalam mengkaji topik “Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs)” peneliti melakukan tinjauan terkait penelitian sebelumnya yang berkaitan. Berikut ini beberapa studi sebelumnya berkaitan dengan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendorong *Sustainable Development Goals* (SDGs):

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul. dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Gan Gan Giantika, Siti Qona’ah: Program CSR PLN Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bendungan Saguling, Sungai Citarum, Bandung, Jawa Barat (2024)	Temuan penelitian memperlihatkan tentang program CSR “Green Employee Involvement” dilakukan oleh PT PLN (Persero) di Waduk Saguling menekankan pada pemberdayaan masyarakat sekitar, khususnya keluarga pemulung, serta kegiatan nyata berupa pembersihan sampah dan eceng gondok di perairan. Kegiatan ini menghasilkan dampak sosial,	Persamaan: Membahas implementasi program CSR PLN berbasis lingkungan dalam pengelolaan sampah yang mendukung tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs). Perbedaan : Lokasi, bentuk kegiatan, sasaran program, dan fokus SDGs berbeda.

		ekonomi, dan lingkungan melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual, seperti kerajinan tangan, pakan ternak, dan pupuk cair.	
2.	Yoga Prawira, Ety Rahayu: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Organik Binaan PT. Pertamina Patra Niaga Terpadu Jakarta Sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (2024)	Penelitian ini membahas terkait program pengelolaan sampah organik berbasis larva maggot <i>Black Soldier Fly (BSF)</i> . Program ini berhasil menciptakan produk ekonomi seperti maggot segar, maggot kering, dan pupuk organik (kasgot). Pengelolaan dilakukan oleh kelompok masyarakat, mayoritas perempuan, sehingga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. CSR ini dinilai memenuhi prinsip <i>Triple Bottom Line</i> (Profit, People, Planet).	Persamaan: Membahas implementasi program CSR berbasis lingkungan dalam pengelolaan sampah yang mendukung tujuan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> . Perbedaan : Lokasi, bentuk kegiatan, sasaran program, dan fokus SDGs berbeda.
3.	Siti Qona'ah, Gan Gan Giantika, George Wilhelm. Bender : Program CSR PT. Astra Internasional Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Gerakan	Temuan ini membahas implementasi program CSR “Semangat Kurangi Plastik” di Kampung Berseri Astra (KBA) yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik	Persamaan: Membahas implementasi program CSR berbasis lingkungan dalam pengelolaan sampah yang mendukung tujuan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .

	Semangat Kurangi Plastik (2022)	sekali pakai melalui kegiatan bank sampah serta mendaur ulang sampah plastik menjadi produk kerajinan seperti ecobrick, kotak tisu, dan tas daur ulang. Program ini membentuk komunitas peduli lingkungan dan mendorong ekonomi sirkular.	Perbedaan : Lokasi, objek program, dan fokus SDGs berbeda.
--	---------------------------------	---	---

Sumber : Dokumen Peneliti 2025

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa program CSR lingkungan umumnya berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal dan pengelolaan sampah berbasis komunitas terbatas seperti melalui bank sampah, pengolahan limbah organik dan anorganik, serta praktik ekonomi sirkular yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa CSR mampu menjadi sarana strategis dalam mendukung pencapaian SDGs poin 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan). Sementara itu, penelitian tentang implementasi CSR di ruang publik perkotaan yang melibatkan masyarakat luas sebagai pengguna fasilitas umum belum sering dilaksanakan. Atas dasar tersebut, studi ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji Implementasi Program CSR *Zero Waste Warriors* PLN Pusharlis dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Taman Alun-alun Regol, Kota Bandung yang

berfokus pada edukasi lingkungan, partisipasi masyarakat, serta perubahan perilaku menuju gaya hidup nol sampah di ruang publik, sehingga dapat berkontribusi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-11 tentang Kota dan Permukiman yang berkelanjutan.

B. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Secara umum, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah peran nyata perusahaan dalam membantu mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui pengembangan program-program yang mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat. Pelaksanaannya menuntut adanya keseimbangan, yaitu tidak semata berorientasi pada perolehan laba, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial serta kelestarian lingkungan (Kholis, 2020). Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban organisasi, khususnya perusahaan, terhadap seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, pemegang saham, masyarakat, serta lingkungan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Sinaga, 2019). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk peran perusahaan dalam mendukung

pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif serta meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan (Nadirah, 2020).

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah upaya perusahaan membangun hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, serta ikut berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ditegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kewajiban ini bukan hanya berlaku bagi perusahaan besar atau yang beroperasi pada sektor sumber daya alam, tetapi juga mencakup seluruh jenis usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), bahkan bagi perusahaan yang baru berdiri ataupun sedang mengalami kerugian sekalipun (Herdiansyah et al., 2022).

2. Model *Corporate Social Responsibility*

Secara umum, perusahaan di Indonesia menerapkan berbagai model dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. Bentuk yang paling sering dilakukan adalah keterlibatan langsung dalam program sosial, mendirikan yayasan atau organisasi sosial perusahaan, maupun memberikan bantuan

atau donasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kotler dan Lee (2005) menjelaskan enam model program CSR, yaitu:

a. *Cause Promotion*

Pada program ini, perusahaan melaksanakan program tersebut dengan mengalokasikan dana maupun sumber daya lain yang dimilikinya untuk menolong menumbuhkan kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap suatu isu sosial tertentu. Selain itu, perusahaan juga bisa mendukung kegiatan penggalangan dana, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program, atau merekrut tenaga sukarela yang akan membantu menjalankan kegiatan tersebut.

b. *Cause Related Marketing (CRM)*

Dalam program tersebut, perusahaan menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan sebagian persentase dari pendapatan penjualan guna mendukung aktivitas sosial. Umumnya, inisiatif ini dihubungkan dengan pemasaran produk spesifik, dilaksanakan dalam periode yang telah ditetapkan, serta diarahkan pada sasaran sosial yang jelas dan terfokus. Dengan strategi ini, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan bisnis, tetapi juga berkontribusi langsung pada keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

c. *Corporate Social Marketing (CSM)*

Program ini berupa kampanye yang dijalankan perusahaan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Tujuan utamanya adalah

agar masyarakat menjadi lebih peduli pada kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Bentuk kampanyenya bisa berupa ajakan menjaga kesehatan, mengurangi risiko kecelakaan, melindungi lingkungan, hingga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan positif.

d. *Corporate Philanthropy*

Perusahaan memberikan sumbangan langsung kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, misalnya berupa uang tunai, paket bantuan, atau layanan gratis. Biasanya, jenis bantuan ini ditujukan pada kelompok masyarakat yang sedang mengalami kesulitan atau yang menjadi fokus perhatian sosial perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat menunjukkan kepedulian langsungnya kepada masyarakat.

e. *Community Volunteering*

Perusahaan mendorong dan memfasilitasi karyawan, mitra, atau pedagang untuk ikut serta dalam kegiatan sukarela. Wujudnya dilakukan melalui pemberian dukungan berupa waktu dan tenaga dari pihak perusahaan untuk membantu organisasi masyarakat setempat ataupun kelompok spesifik yang menjadi target program sosial yang dijalankan perusahaan. Hal ini memperkuat ikatan antara perusahaan, karyawan, dan komunitas di sekitarnya.

f. *Socially Responsible Business Practice*

Program ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya menjalankan bisnis sebatas kewajiban hukum saja. Lebih dari itu, perusahaan juga melakukan investasi dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab, perusahaan menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi positif bagi masyarakat luas.

C. *Triple Bottom Line*

Pelaksanaan program CSR berfokus melalui konsep *triple bottom line*. Pada tahun 1997, John Elkington memperkenalkan konsep ini, yang membagi fokus perusahaan ke dalam tiga aspek utama, yaitu keuntungan (profit), manusia (people), dan planet (lingkungan). Awalnya, perusahaan didirikan tujuan untuk mencari keuntungan finansial semata. Namun, seiring dengan perkembangan zaman perusahaan mengalami perubahan yaitu tidak lagi hanya fokus pada laba, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta menjaga kelestarian lingkungan.

Konsep *Triple Bottom Line* ini berawal dari adanya permasalahan sosial serta kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat aktivitas manusia. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya segera karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, termasuk keberlanjutan

usaha itu sendiri (Handayani, 2023). Ariastini, N. N. (2023) menambahkan bahwa TBL bukan berorientasi untuk keuntungan perusahaan, namun menuntut perusahaan berkontribusi dalam pembangunan penduduk serta memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Dengan menerapkan TBL, perusahaan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, selain menguntungkan secara finansial, hal ini juga membawa dampak positif bagi aspek sosial dan lingkungan bagi generasi mendatang. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci terkait konsep triple bottom line pada aspek keuntungan, manusia, dan lingkungan:

1. Profit

Profit yaitu laba yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya. Profit diperlukan agar perusahaan tetap dapat berjalan, berkembang, dan berinovasi. Dalam konsep ini, keuntungan tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu menciptakan nilai ekonomi yang memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Misalnya, melalui penyediaan lapangan pekerjaan, penciptaan inovasi produk, serta kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat (Lumi et al., 2023). Dengan menerapkan konsep Zero Waste yang berfokus pada prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, Rot*), perusahaan dapat mengurangi penggunaan bahan baku serta menciptakan peluang ekonomi baru, seperti pemanfaatan kembali limbah plastik diubah menjadi produk yang dapat

dipasarkan dan memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut memberikan keuntungan yang dihasilkan menjadi lebih berkelanjutan, karena tidak hanya memberikan dampak positif bagi keuangan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

2. People

People adalah tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberikan perhatian dan manfaat bagi masyarakat serta semua pihak terdampak oleh kegiatan operasionalnya. Menurut Alifiarisma Maricar & Sunu Priyawan (2024) keberadaan masyarakat memiliki peran penting dalam keberlangsungan perusahaan, sehingga perusahaan dituntut untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya. Dalam program *Zero Waste Warriors*, PLN Pusharlis berkolaborasi dengan Filantra serta turut mengajak Pemerintah Kelurahan Pasirluyu dan Kecamatan Regol serta komunitas GOBER dan juga DLH Kota Bandung untuk berpartisipasi dalam kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai aksi peduli lingkungan. Program ini berupaya mendorong kepedulian serta keterlibatan publik untuk memelihara kebersihan lingkungan. Dengan begitu, konsep *Zero Waste* membantu memperkuat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat, serta menumbuhkan perilaku peduli lingkungan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial.

3. Planet

Planet berhubungan dengan kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Konsep ini menuntut perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha tanpa merusak sumber daya alam dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem. Menurut Lumi dkk. (2023), planet merujuk pada semua dampak yang ditimbulkan perusahaan, secara langsung juga tidak langsung pada lingkungan. Kingsley dkk. (2014) dalam Maricar & Priyawan (2024), menyatakan bahwa perusahaan harus ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta keberlanjutan keragaman hayati terkhusus pada keberlanjutan lingkungan dan memastikan bahan yang digunakan dalam produksi diolah dengan metode dan teknik yang baik. Program *Zero Waste Warriors* merupakan wujud nyata kepedulian terhadap bumi, dengan tujuan mengurangi timbulan sampah dan mencegah pencemaran di ruang publik. Melalui penerapan prinsip *Zero Waste*, PLN Pusharlis berupaya untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan dan kegiatan CSR nya tidak merusak alam, melainkan membantu menjaga keberlanjutan ekosistem.

D. Implementasi *Corporate Social Responsibility*

1. Tahapan Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung jawab sosial dapat dilaksanakan melalui CSR, yaitu berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong kesejahteraan masyarakat,

memperbaiki lingkungan, serta memberikan beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, turut berkontribusi dalam pemberian dana bagi kebersihan lingkungan, memberikan sumbangan untuk meningkatkan fasilitas desa maupun masyarakat sekitar perusahaan (Oktina et al., 2020). Menurut Wibisono dalam (Putra, 2017) terdapat empat tahapan dalam implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yakni:

- a. Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang menentukan arah pelaksanaan CSR. Pada tahap ini terdapat langkah penting yang dilakukan meliputi *CSR Awareness Building*, *CSR Assessment*, dan *Manual Building*. *Awareness Building* adalah tahap awal untuk melaksanakan CSR dan memperkuat komitmen yang dapat dilaksanakan melalui sosialisasi. Selanjutnya, *CSR Assessment* merupakan langkah dalam mengidentifikasi hal-hal yang perlu diprioritaskan. Pada tahap ini perusahaan menilai isu sosial atau lingkungan yang paling relevan dengan kegiatan bisnisnya dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Tahap akhir, yaitu tahap membangun *CSR Manual Building* melalui pembuatan pedoman pelaksanaan CSR. Pedoman ini dapat disusun oleh tim internal perusahaan atau dengan bantuan tenaga ahli di bidang CSR untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang berlaku.

- b. Tahap pelaksanaan adalah proses penerapan program CSR sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal penting seperti pengorganisasian, penyusunan kegiatan, penempatan sumber daya manusia, pengarahan pelaksanaan program, serta pengawasan agar kegiatan CSR berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, tahap ini juga mencakup evaluasi awal untuk memastikan efektivitas kegiatan selama proses berlangsung.
- c. Tahap evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai sejauh mana program CSR memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui evaluasi, perusahaan dapat mengukur efektivitas, manfaat, serta menemukan kekurangan dari kegiatan yang telah dijalankan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan program CSR di masa mendatang, sesuai dengan rekomendasi dari pihak internal maupun eksternal yang terlibat dalam pelaksanaannya.
- d. Tahap pelaporan merupakan proses penyusunan laporan hasil pelaksanaan program CSR yang digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (*shareholders*) maupun pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders*). Laporan ini juga berfungsi sebagai bentuk transparansi perusahaan serta dokumentasi resmi atas kegiatan sosial dan lingkungan yang telah

dilakukan. Melalui laporan tersebut, perusahaan dapat menilai konsistensi pelaksanaan CSR dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

2. Prinsip-Prinsip Umum Implementasi CSR

Perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan utama dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, yaitu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan perlu berlandaskan pada standar, pedoman, atau prinsip yang berlaku secara umum yaitu ISO 26000 yang menetapkan sejumlah prinsip sebagai landasan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), di antaranya meliputi:

- a. Akuntabilitas, perusahaan wajib mempertanggungjawabkan seluruh dampak yang timbul dari aktivitas yang dijalankannya, baik yang memengaruhi kehidupan masyarakat, kondisi perekonomian, maupun keberlanjutan lingkungan. Perusahaan perlu menunjukkan keterbukaan untuk menerima pengawasan, mempertanggungjawabkan keputusan, serta menjawab segala akibat yang ditimbulkan. Akuntabilitas juga mencakup kewajiban manajemen dalam memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada pemegang kendali organisasi maupun otoritas hukum.

- b. **Transparansi**, prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam setiap kegiatan perusahaan yang memengaruhi masyarakat dan lingkungan. Transparansi dapat diwujudkan dengan memberikan informasi jelas mengenai tujuan dan lokasi kegiatan, melibatkan pemangku kepentingan, menjelaskan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya menetapkan standar evaluasi kinerja CSR; menunjukkan kinerja perusahaan dalam isu-isu CSR; menguraikan sumber daya, jumlah dan penggunaan dana, menyampaikan efek yang diketahui dan potensial terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan, serta menjalankan proses identifikasi, pemilihan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan keterbukaan, perusahaan dapat membangun rasa percaya dan memperkuat hubungan dengan berbagai pihak.
- c. **Perilaku Etis**, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan keadilan. Perilaku etis menuntut perusahaan untuk peduli terhadap manusia, hewan, dan lingkungan, serta bertindak sesuai norma moral dalam setiap keputusan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan tindakannya tidak merugikan pihak lain.
- d. **Menghormati Kepentingan Pemangku Kepentingan**, perusahaan perlu menghormati dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh kegiatan usahanya walaupun kepentingan

- pemilik, anggota, atau konsumen penting, perusahaan juga harus memperhatikan hak serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
- e. Menghormati Hukum, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus mentaati aturan hukum merupakan hal yang wajib. Prinsip ini mengharuskan perusahaan mentaati pada peraturan nasional sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan hukum.
- f. Menghormati Norma Perilaku Internasional, perusahaan dituntut untuk menjunjung norma perilaku internasional dengan menghormati serta mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku secara global. Apabila peraturan nasional maupun implementasinya belum menyediakan standar sosial atau lingkungan yang memadai, perusahaan perlu tetap berupaya mengacu, setidaknya pada tingkat minimum, pada prinsip dan praktik yang diakui dalam norma-norma internasional.
- g. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), perusahaan harus memperlakukan setiap individu secara adil, melindungi hak-haknya, dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap HAM dalam semua kegiatan operasionalnya.

3. Manfaat Implementasi *Corporate Social Responsibility*

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah diimplementasikan secara maksimal dapat menghadirkan beragam dampak positif, baik berupa manfaat maupun nilai tambah, bukan hanya

bagi pihak perusahaan, tetapi juga bagi pemerintah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan secara keseluruhan. Holme dan Watts dalam Situmeang (2016) mengemukakan bahwa salah satu manfaat terpenting penerapan CSR ialah semakin kuatnya citra dan reputasi perusahaan yang positif di hadapan publik. Dengan kata lain, CSR bukan sekadar bentuk bantuan sosial yang diberikan perusahaan kepada masyarakat, tetapi merupakan strategi jangka panjang yang membawa berbagai keuntungan nyata bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Wibison dalam (Kholis, 2020) penerapan CSR yang baik memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah dan negara, diantaranya:

- a. Manfaat untuk perusahaan, CSR dijalankan dengan harapan perusahaan memperoleh berbagai keuntungan. Terdapat manfaat penting yang dapat dirasakan perusahaan melalui implementasi program, yaitu membangun citra positif perusahaan dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, dan menjadikan investasi jangka panjang sebagai modal non finansial, dengan menjaga kualitas sumber daya manusia perusahaan juga mampu meminimalkan risiko, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan manajemen risiko yang mudah.
- b. Manfaat bagi masyarakat, pelaksanaan program yang efektif bisa memberikan kesempatan kerja serta meningkatkan taraf hidup mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat. Melalui berbagai

program pemberdayaan, pelatihan, dan bantuan sosial, CSR membantu memperkuat kemandirian masyarakat lokal serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.

- c. Manfaat CSR terhadap lingkungan, Adanya implementasi CSR yang berorientasi pada kelestarian lingkungan berperan penting dalam menghindari pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Penerapan CSR berperan dalam melindungi kualitas dan melestarikan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
- d. Manfaat CSR bagi negara, pelaksanaan CSR yang sesuai dengan aturan pemerintah dapat membantu perusahaan untuk terhindar dari citra negatif berupa dugaan *corporate misconduct* atau praktik tidak etis seperti penyuapan kepada aparat pemerintah yang berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap korupsi. Selain itu, pelaksanaan CSR secara konsisten juga berdampak positif terhadap penerimaan pajak negara yang berasal dari aktivitas bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi CSR yang dijalankan dengan baik akan membawa dampak positif bagi semua pihak. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan dalam bentuk reputasi dan keberlanjutan usaha, tetapi juga oleh masyarakat, lingkungan, dan negara melalui peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup. CSR juga berperan penting

dalam membantu perusahaan menghadapi masa krisis, karena kegiatan sosial yang dilakukan secara konsisten dapat mengurangi persepsi negatif dari publik serta dapat mempererat hubungan antara perusahaan dan stakeholder. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan bisnis perusahaan dengan kebutuhan sosial masyarakat, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

4. *Corporate Social Responsibility* Sebagai Kontribusi Perusahaan Pada *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Corporate Social Responsibility yaitu kewajiban perusahaan yang dilaksanakan sebagai bentuk komitmen terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pelaksanaan CSR harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, bukan kegiatan yang bersifat sementara agar manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat dan lingkungan. Dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seluruh pihak seperti pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil harus bekerja sama.

Tujuan pembangunan berkelanjutan dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lalu telah diadopsi dalam berbagai negara, salah satunya Indonesia. SDGs didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan

lingkungan, yang saling berkaitan satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan merupakan perubahan yang mengarah pada perbaikan kondisi kehidupan manusia dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, investasi, kemajuan teknologi, serta transformasi kelembagaan dalam rangka memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Pertiwi, 2017).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas hidup generasi masa kini maupun yang akan datang.” Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan bukan hanya difokuskan pada peningkatan keuangan, melainkan memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial. Fokus utamanya adalah menjaga kehidupan dan keselamatan manusia serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar generasi berikutnya dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Hal ini menunjukkan pentingnya kewajiban moral dan etika dalam pengelolaan potensi alam serta pertimbangan dampak jangka panjang dari setiap keputusan pembangunan. Oleh sebab itu, kesejahteraan sosial,

perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi harus dijalankan secara bersamaan melalui pendekatan lengkap.

Menurut Alisjahbana & Murniningtyas (2018), prinsip utama pembangunan berkelanjutan terletak pada pengintegrasian dampak positif dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan di sekitarnya. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam secara efektif dengan tetap menjaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Setiap kegiatan ekonomi perlu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai fondasi utama, dengan dukungan pilar tata kelola sebagai pendukung. Selain itu, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikelompokkan ke dalam empat pilar utama, di mana setiap pilar saling terkait dan saling mendukung, yaitu sebagai berikut:

- a. Pilar Sosial, untuk mendorong peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pilar sosial dalam pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk:
 - 1) Mengentaskan kemiskinan (Goal 1).
 - 2) Menanggulangi kelaparan melalui perbaikan status gizi dengan dukungan sistem pertanian yang berkelanjutan (Goal 2).
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan yang mencakup seluruh

kelompok usia secara menyeluruh (Goal 3).

4) Penyediaan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat dengan penekanan pada pengembangan keterampilan generasi muda (Goal 4).

5) Terwujudnya kesetaraan gender di seluruh aspek kehidupan, yang merupakan aspek utama untuk tercapainya aspek sosial (Goal 5).

b. Pilar Ekonomi, aspek tersebut mempunyai ruang lingkup menyeluruh, khususnya untuk mendukung pencapaian di bidang kesehatan, pendidikan, serta ketidakmampuan ekonomi. Dalam pembangunan berkelanjutan, pilar ekonomi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Ketersediaan energi dengan harga yang dapat diakses masyarakat serta berfokus pada penggunaan energi terbarukan (Goal 7).

2) Pengembangan ekonomi berkelanjutan yang mendukung terciptanya pekerjaan layak tanpa merugikan alam (Goal 8).

3) Pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta pemanfaatan pengembangan serta struktur penunjang yang ramah alam (Goal 9).

4) Penurunan ketimpangan berkontribusi dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang merata, terbuka, dan

melibatkan semua pihak (Goal 10).

5) Kolaborasi yang mendorong dalam pembangunan serta perekonomian yang berkelanjutan (Goal 17).

c. Pilar Lingkungan, pada pilar ini merupakan peran paling penting bagi manusia dimana lingkungan hidup, alam dan seisinya merupakan kebutuhan bagi semua aspek baik bagi aspek sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pembangunan berkelanjutan tidak sampai merusak kelestarian lingkungan dan fungsi lingkungan bagi generasi sekarang dan di masa mendatang. Pilar lingkungan memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Ketersediaan sanitasi serta air bersih yang dikelola sambil menjaga kelestarian lingkungan (Goal 6).

2) Pengembangan kawasan permukiman dan kota adil, terlindungi, berkelanjutan, serta ramah lingkungan (Goal 11).

3) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam dengan mengurangi timbulan sampah dan menerapkan pola produksi produksi ramah lingkungan (Goal 12).

4) Pengelolaan perubahan iklim sebagai upaya mendukung kelangsungan pembangunan berkelanjutan (Goal 13).

5) Menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati di darat maupun laut agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga (Goal 14 dan 15).

Di sisi lain, SDGs menambahkan pilar tata kelola dan kemitraan global sebagai elemen pendukung dalam tercapainya pembangunan yang berorientasi keberlanjutan. Pilar ini mencakup tujuan untuk memperkuat institusi yang adil, transparan, dan akuntabel, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat luas (Goal 16).

Gambar 2. 1 Sustainable Development Goals



Sumber : United Nations (2015)

Secara keseluruhan, pembangunan berkelanjutan memiliki visi kolektif (*shared vision*), yang di antaranya meliputi:

- a) Bersifat menyeluruh, karena meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai pilar utama, dengan penguatan pada tata kelola (*governance*).
- b) Tersruktur berdasarkan tema, yaitu ada 17 Tujuan (Goals) yang saling berkaitan yaitu : (1) Mengentaskan kemiskinan; (2)

Mengatasi kelaparan; (3) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan; (4) Menyediakan pendidikan yang bermutu; (5) Mewujudkan kesetaraan gender; (6) Menjamin akses air bersih dan sanitasi layak; (7) Menyediakan energi bersih dan terjangkau; (8) Menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; (9) Mengembangkan industri, inovasi dan infrastruktur; (10) Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi; (11) Membangun kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) Mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Menangani perubahan iklim; (14) Melestarikan ekosistem laut; (15) Melindungi ekosistem darat; (16) Memperkuat perdamaian, keadilan dan institusi yang tangguh; (17) Memperkuat kemitraan untuk pencapaian tujuan.

- c) Holistik dan terintegrasi, di mana seluruh tujuan saling kerja sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- d) Inklusif, menekankan prinsip tidak ada seorang pun yang tertinggal, sehingga semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan manfaat pembangunan tanpa diskriminasi.
- e) Mitra (*Partnership*), adanya kontribusi dari para pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai SDGs meliputi instansi pemerintah, sektor bisnis, organisasi sosial, lembaga pendidikan, dan warga masyarakat.

Dengan demikian, *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan sekaligus menegakkan keadilan dan inklusivitas dalam mencapai targetnya. Dalam konsep ini juga juga mengedepankan pentingnya keadilan seperti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), anti diskriminasi, serta dukungan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Dalam upaya mencapai tujuannya, pembangunan berkelanjutan melibatkan beberapa pemangku kepentingan meliputi warga masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi sosial, sektor bisnis, serta instansi pemerintah.

E. Konsep *Zero Waste*

Menurut *Zero Waste International Alliance (Zero Waste Definition - Zero Waste International Alliance, 2018)*, *Zero Waste* didefinisikan sebagai upaya “konservasi semua sumber daya melalui produksi, konsumsi, penggunaan ulang, dan pemulihan produk, kemasan, dan material, tanpa dibakar serta tanpa pembuangan yang merusak tanah, air, atau udara.” Di kawasan maju dengan penduduk yang berpenghasilan tinggi, pengelolaan sampah umumnya telah menerapkan pendekatan terpadu (*Integrated Waste Management /IWM*). Pendekatan ini dapat berjalan efektif karena pengelolaan sampah dilakukan dengan pemilihan dan penerapan teknologi serta program manajemen yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan (Tchobanoglous & Kreith, 2002) dalam (Nizar et al., 2017).

Barang-barang bekas dimanfaatkan kembali, diperbaiki, dan didaur ulang secara berkelanjutan oleh masyarakat di negara berkembang. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih terdapat keterbatasan kesadaran dan dukungan industri terhadap pengelolaan sampah, karena mayoritas masyarakat masih memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal, beberapa jenis sampah sebenarnya dapat memberikan nilai ekonomi jika dikelola dengan baik, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap kawasan sekitarnya. Produksi yang tidak berkelanjutan dan pola konsumsi yang tinggi menimbulkan masalah lingkungan, seperti pencemaran, deforestasi, perubahan iklim, dan menurunnya keanekaragaman hayati serta sumber daya. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya strategi dalam pengurangan sampah dan penerapan konsep “menghilangkan sampah dari proses dan produk” atau yang dikenal sebagai strategi *Zero Waste* (Waste et al., 2010).

Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola kota modern. Dalam Konsep *Zero Waste* menolak penggunaan metode pembakaran (insinerasi) dan penimbunan sampah (landfill) karena dianggap tidak berkelanjutan. Masalah ini dapat di atasi dengan kegiatan daur ulang, pemrosesan ulang, serta desain ulang material untuk meminimalkan volume limbah di tempat pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan Lehmann (2011) dalam (Nizar et al., 2017), eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat diminimalkan melalui penerapan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan, yang berfokus pada tiga aspek utama

yaitu pencegahan timbulan sampah (*waste avoidance*), pemanfaatan material secara efisien, dan pengembalian sumber daya (*resource recovery*).

Berdasarkan data UN-MEA (2006) dan Ramsar (2012) dalam (Nizar et al., 2017) wilayah perkotaan hanya menempati 2% permukaan bumi, sedangkan dari kota-kota besar menghasilkan sekitar 70% dari total sampah dunia serta mengonsumsi lebih dari 75% sumber daya alam. Dari hasil permasalahan tersebut, mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam, peningkatan konsumsi energi dan air, mencemari lingkungan, dan pada akhirnya menambah beban pengelolaan lingkungan. Oleh sebab itu, strategi *Zero Waste* menjadi solusi inovatif untuk menekan produksi sampah melalui perubahan sistem produksi dan perilaku konsumsi. Strategi *Zero Waste* telah diterapkan oleh beberapa kota di dunia, termasuk Adelaide, San Francisco, dan Stockholm, sehingga mereka menjadi kota pertama yang mencapai target tersebut.

Pada tahun 1973, Palmer memperkenalkan konsep *Zero Waste* pertama kali sebagai upaya untuk memulihkan limbah kimia menjadi sumber daya (Nizar et al., 2017). Sejak tahun 1995, berbagai negara mulai menerapkan kebijakan dan undang-undang terkait *Zero Waste*. Strategi *Zero Waste* berhasil mencapai target global pertamanya pada 2010, yang dicapai oleh kota Canberra di Australia (Connett, 2013; Snow et al., 2003 dalam (Nizar et al., 2017). Suatu "*Resource Recovery Park*" dibangun di Canberra untuk mendukung pengembangan industri daur ulang. Pada tahun 2004, tingkat

pengalihan sampah di kota ini telah mencapai 70%. Negara lain seperti New Zealand juga mengeluarkan kebijakan *Zero Waste* pada tahun 1997 untuk mendukung pengurangan masalah sampah dan pengelolaan berkelanjutan. Pada tahun 2000, Di Amerika Serikat, California Del Norte County menjadi wilayah pertama yang menggunakan konsep Zero Waste. Dewan Pengelolaan Sampah Terpadu California pada tahun 2001 mengadopsi Zero Waste sebagai strategi utama untuk pengelolaan sampah jangka panjang (Connett, 2013 dalam Nizar et al., 2017). Di Kota Inggris, *Zero Waste* dianggap sebagai cara untuk mengurangi dampak lingkungan dari sampah secara maksimal dengan cara mencegah, melestarikan, dan memulihkan nilai material yang masih bisa dimanfaatkan (Phillips et al., 2011 dalam (Nizar et al., 2017). Sementara itu, di Stockholm meluncurkan “*Vision Stockholm 2030*” yang bertujuan menjadikan kota tersebut efisien dalam penggunaan sumber daya dan bebas dari bahan bakar fosil pada tahun 2050.

Zero Waste dikembangkan untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan langkah-langkah seperti penghindaran, pengurangan, penggunaan ulang, mendesain ulang, pemulihan, daur ulang, perbaikan, pabrikasi ulang, penjualan ulang, serta distribusi kembali potensi limbah. Selain menekankan pada daur ulang, berfokus pada perancangan produk untuk pencegahan sampah sejak awal. Menilai efektivitas *Zero Waste* memerlukan perubahan konsep pengelolaan sampah menjadi sistem *Zero Waste*, yang membutuhkan sejumlah parameter, termasuk cakupan geografis, pencegahan

sampah melalui desain dan perilaku, pemanfaatan ulang, desain ulang, dan lainnya. Berdasarkan Zaman (2014) dalam (Nizar et al., 2017) ada tujuh macam indikator keberhasilan penerapan *Zero Waste* yaitu Aspek sosial-kultural, ekonomi, organisasi, geo-administratif, manajemen, lingkungan, serta pemerintahan dan kebijakan. Evaluasi efektivitas ini sangat penting untuk mendapati sejauh mana sistem pengelolaan sampah telah berkembang menuju sistem *Zero Waste*.

F. Relevansi Kelestarian Lingkungan dengan Pekerja Sosial

Pekerja sosial tidak hanya berfokus pada isu kemiskinan, ketimpangan, atau kesejahteraan sosial, tetapi juga berperan penting dalam menjembatani perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Menurut (Dominelli, 2012) praktik *green social work* berfokus pada keterkaitan antara keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis, di mana pekerja sosial berperan sebagai agen perubahan dalam menanggapi krisis lingkungan. *Green social work* dan kelestarian lingkungan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai dasar tercapainya kesejahteraan manusia.

Adanya *green social work* dapat membantu merubah perilaku serta memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Sementara itu, kelestarian lingkungan bertujuan

membangun secara sosial dan moral masyarakat agar mampu menjaga, mengelola, dan memelihara lingkungan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat, karena kesejahteraan sosial tidak dapat dicapai tanpa lingkungan yang sehat dan lestari. Berikut peran pekerja sosial dalam *green social work* menurut (Dominelli, 2012) yaitu:

1. Advokat Keadilan Lingkungan : Peran ini untuk membela hak-hak kelompok rentan yang terdampak oleh krisis lingkungan, seperti masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Peran ini harus memperjuangkan akses yang adil terhadap sumber daya alam dan memperhatikan dampak lingkungan terhadap kesejahteraan sosial.
2. Agen Perubahan Sosial dan Ekologis : Peran ini bertujuan agar dapat mendorong masyarakat mengubah perilaku yang merusak lingkungan dan membiasakan gaya hidup lebih ramah dan berkelanjutan terhadap alam.
3. Pemberdaya Komunitas: Peran ini untuk membantu masyarakat agar memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Tujuannya bukan hanya memberi bantuan sementara, tetapi membangun kemandirian dan ketahanan sosial-ekologis dalam jangka panjang.
4. Integrator Nilai Etika dan Ekologis : Peran ini menggabungkan nilai-nilai keadilan sosial dengan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan dalam setiap praktik pekerjaan sosial. Jadi, pekerja sosial tidak hanya peduli pada

kesejahteraan sosial, tetapi juga memperhatikan dampak setiap tindakan terhadap alam dan kehidupan di bumi.

5. Pendidik dan Fasilitator Kesadaran Lingkungan : Peran ini menekankan bahwa pekerja sosial juga harus menjadi pendidik masyarakat (*educator*) dan fasilitator perubahan perilaku. Tujuannya adalah membantu masyarakat memahami dampak perilaku manusia terhadap lingkungan dan mendorong mereka untuk hidup lebih ramah lingkungan.

